

Rieke Diah Pitaloka Sebut Indikasi Tidak Adanya Transparansi BPP BBM dan Penerima Subsidi BBM

Updates. - JURNALIS.ID

Sep 6, 2022 - 14:11



Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka

JAKARTA - Anggota Komisi VI [DPR RI](#) Rieke Diah Pitaloka menyebutkan adanya indikasi kuat tidak transparannya data Biaya Pokok Produksi (BPP) [BBM](#) serta alokasi APBN untuk subsidi energi, subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu. Rieke mengatakan, pada Rapat Kerja 5 September 2022 lalu, Komisi VI [DPR RI](#) sudah meminta kepada Kementerian BUMN menyampaikan secara tertulis terkait lima poin.

Pertama, BPP crude oil dari Indonesia. Kedua, rincian BPP crude oil impor.

Ketiga, rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022. Keempat, rincian dan dari mana sumber data penerima subsidi energi [BBM](#), LPG dan Listrik termasuk prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi. Kelima, tunggakan hutang subsidi pemerintah ke Pertamina dan PLN.

"Namun hingga hari ini, data-data yang diminta belum disampaikan Kementerian BUMN. Karena itu tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia maupun impor, untuk mengungkap berapa sesungguhnya angka keekonomian yang dimaksud pemerintah," tutur Rieke dalam Rapat Kerja Komisi VI [DPR RI](#) bersama perusahaan-perusahaan BUMN di Gedung [DPR RI](#), Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Di sisi lain, kata politisi [PDI-Perjuangan](#) ini, data penerima subsidi termasuk prosedur dan mekanisme serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi, juga belum disampaikan ke Sekretariat Komisi VI [DPR RI](#). Maka itu, Rieke mendukung pembatalan kenaikan harga [BBM](#) subsidi karena ada indikasi kuat tidak adanya transparansi BPP [BBM](#) dan penerima subsidi [BBM](#).

Rieke juga mempertanyakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) [BBM](#) untuk 20,65 juta keluarga tidak mampu bersumber dari relokasi anggaran subsidi [BBM](#). Dia menuturkan, pemerintah pada 3 September 2022 menyebutkan lebih dari 70 persen subsidi [BBM](#) dinikmati kelompok mampu, karenanya sebagian subsidi energi dialihkan untuk [BLT BBM](#) senilai Rp12,4 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu yang sudah dialokasikan sebelumnya dan subsidi senilai Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta.

"Alokasi APBN untuk [BLT](#) sebesar Rp28,8 triliun dari pos perlindungan sosial dan ditambah Rp12,4 triliun dari relokasi anggaran APBN untuk subsidi [BBM](#) untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu. [BLT](#) Perlindungan Sosial Rp28,8 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu, artinya per-keluarga tidak mampu seharusnya mendapatkan Rp1,39 juta dari [BLT](#)," ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.

Rieke pun mempertanyakan dari mana sumber penerimaan data subsidi energi [BBM](#), termasuk bagaimana prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi [BBM](#). Dia mengatakan, apakah terjadi duplikasi anggaran untuk [BLT BBM](#) dan subsidi bagi pekerja dari APBN perlindungan sosial dan realokasi anggaran subsidi [BBM](#) September 2022. "Apakah data 20,6 juta warga penerima [BLT](#) perlindungan sosial dan 20,6 juta penerima [BLT BBM](#) adalah data yang sama?" katanya.

Menurutnya, jika keluarga tidak mampu penerima [BLT](#) perlindungan sosial sama dengan data penerima [BLT BBM](#), maka seharusnya per-keluarga mendapatkan Rp1,39 juta dari [BLT](#) Perlindungan Sosial dan Rp600 ribu dari [BLT BBM](#). "Harusnya 1 keluarga mendapatkan Rp1,99 juta. Berdasarkan argumentasi di atas saya secara pribadi mendukung Presiden Jokowi untuk membongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP [BBM](#) dan alokasi APBN energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan subsidi BLT [BBM](#)," tegas Rieke.

Selanjutnya, Rieke mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif terhadap Pertamina. Ketiga, mendukung KPK dan Kejaksaan Agung membongkar indikasi permainan impor [BBM](#). Keempat, mendukung KPK dan Kejaksaan Agung mengungkap indikasi penyimpangan uang negara yang indikasinya beroperasi melalui data-data yang tidak aktual dan akurat terkait BPP [BBM](#) dan penerima subsidi bantuan sosial dan [BLT BBM](#)," imbuh Rieke. (ann/sf)